

Menneg LH Tak Menolak Pembangunan PLTN

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menegaskan, pihaknya tidak menolak kebijakan pemerintah yang akan menggunakan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik. Namun, Menneg LH memberi catatan khusus, yakni perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Kami menerima kebijakan itu dan pembangunan PLTN dalam urutan prioritas yang pantas. Kami menyatakan agar persyaratan SDM-nya lebih ketat karena salah sedikit saja tidak boleh. Soal amdal juga kami pantau terus," kata Rachmat di Jakarta, Rabu (11/7).

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memperoleh penolakan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat. Mereka berharap pemerintah mengembangkan energi alternatif yang melimpah di Indonesia.

Sehari sebelumnya, Selasa, sejumlah wakil masyarakat dari Kudus, Jawa Tengah, diterima Rachmat selama tiga jam di Jakarta. Di antaranya, Masyarakat Reksa Bumi (Marem), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, Forum Masyarakat Muria, dan LSM Tapak.

Prinsipnya, mereka menolak rencana pembangunan PLTN di Dukuh Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara. Penolakan mereka secara intens dimulai awal Juni lalu hingga kini, di antaranya dengan mendirikan tenda "tolak PLTN" di depan gedung DPRD Kudus.

"Saya sampaikan kepada mereka jangan khawatir karena operasionalnya masih

lama dan dengan syarat ketat. Setiap instalasi yang terkait lingkungan hidup itu juga kami pantau. Saya juga katakan bahwa energi-energi alternatif terus dikembangkan," katanya.

Beberapa energi alternatif yang saat ini didorong untuk terus dikembangkan di antaranya tenaga surya, panas bumi, angin, dan minyak jarak.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan energy (primer) mix tahun 2025 mendatang. Masing-masing minyak bumi kurang dari 20 persen, gas bumi lebih dari 30 persen, batu bara 33 persen, biofuel 5 persen, panas bumi 5 persen, energi baru terbarukan lain, termasuk nuklir, surya, angin, bio massa menjadi 5 persen, dan bahan bakar lain dari pencairan batubara lebih dari 2 persen.

PLTN sendiri menurut rencana masih akan beroperasi pada tahun 2016. (GSA)

Jakarta, Kompas